

TESIS

**PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT
TERHADAP PRAKTIK *CREATIVE ACCOUNTING***

***THE EFFECT OF STOCK OWNERSHIP, INDEPENDENT
BOARD OF COMMISSIONERS AND CHARACTERISTICS OF
THE AUDIT COMMITTEE ON CREATIVE ACCOUNTING
PRACTICES***

disusun dan diajukan oleh

**NADHIYAH PUTRI WAHDANA
A062192014**



kepada

**PRODI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT
TERHADAP PRAKTIK *CREATIVE ACCOUNTING***

Disusun dan diajukan oleh

NADHIYAH PUTRI WAHDANA

A062192014

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 22 Agustus 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Ketua



Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE.,M.Si.,

NIP.196305151992031003

Anggota



Dr. R.A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA

NIP.196703191992032003

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA

NIP.196703191992032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si

NIP.196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadhiyah Putri Wahdana
Nim : A062192014
Program Studi : Magister Akuntansi
Jenjang : S2

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PRAKTIK CREATIVE ACCOUNTING

Adalah karya saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya didalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

2022



Yang membuat pernyataan

Nadhiyah Putri Wahdana
Nadhiyah Putri Wahdana

ABSTRAK

Nadhiyah. Pengaruh Kepemilikan Saham, Dewan Komisaris Independen, dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Praktik Creative Accounting (dibimbing oleh Abdul Hamid Habbe dan Ratna Ayu Damayanti)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham, dewan komisaris independen dan karakteristik komite audit terhadap praktik *creative accounting*. Objek penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sebanyak 90 perusahaan menjadi sampel penelitian yang dipilih menggunakan metode purposive sampling.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan laporan keuangan dan laporan tahunan pada situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*. Keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap praktik *creative accounting*. Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, aktivitas komite audit dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*.

Kata Kunci: Kepemilikan Saham, Dewan Komisaris Independen, Karakteristik Komite Audit dan Praktik *Creative Accounting*.

ABSTRACT

Nadhiyah. The Effect of Stock Ownership, Independent Board of Commissioners and Characteristics of The Audit Committee on Creative Accounting Practices. (Supervised by Abdul Hamid Habbe and Ratna Ayu Damayanti)

This study aims to analyze the effect of stock ownership, independent board of commissioners and characteristics of the audit committee on creative accounting practices. The object of this research is a state-owned company listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period. A total of 90 companies became the research sample which were tested using purposive sampling method.

The data collection method used in this research is documentation technique by collecting financial reports and annual reports on the Indonesia Stock Exchange (IDX) website. The data analysis technique used multiple linear regression.

Based on the results of the multiple regression analysis conducted, it can be concluded that managerial ownership has a negative effect on creative accounting practices. The expertise of the audit committee has a positive effect on creative accounting practices. Institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee activity and audit committee independence have no effect on creative accounting practices.

Keywords: Stock Ownership, Independent Board of Commissioners, Characteristics of the Audit Committee, and Creative Accounting Practices.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	12
1.4.2 Kegunaan Praktis	13
1.4.3 Kegunaan Kebijakan.....	13
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	13
1.6. Definisi dan Istilah	13
1.7. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	16
2.1.1 <i>Positive Accounting Theory (PAT)</i>	16
2.1.2 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	18
2.2 <i>Creative Accounting</i>	20
2.2.1 <i>Definisi Creative Accounting</i>	20
2.2.2 <i>Motivasi Creative Accounting</i>	22
2.2.3 <i>Pola Creative Accounting</i>	24
2.2.4 <i>Metode Creative Accounting</i>	25
2.3 <i>Good Corporate Governance</i>	30
2.3.1 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	30
2.3.2 Unsur-Unsur <i>Good Corporate Governance</i>	32
2.3.3 Kepemilikan manajerial	32
2.3.4 Kepemilikan institusional	33
2.3.5 Dewan komisaris.....	34
2.4 Karakteristik Komite Audit	35
2.4.1 Aktivitas Komite Audit	35
2.4.2 Keahlian Komite Audit.....	35
2.4.3 Independensi Komite Audit	36
2.5 Tinjauan Empiris	37

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	41
3.1 Kerangka Konseptual.....	41
3.2 Pengembangan Hipotesis	42
3.2.1 Pengaruh Kepemilikan Saham terhadap Praktik <i>Creative Accounting</i>	42
3.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Praktik <i>Creative Accounting</i>	43
3.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Praktik <i>Creative Accounting</i>	44
3.2.4 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Praktik <i>Creative Accounting</i>	45
3.2.5 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Praktik <i>Creative Accounting</i>	46
3.2.6 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Praktik <i>Creative Accounting</i>	47
BAB IV METODE PENELITIAN	49
4.1 Objek Penelitian.....	49
4.2 Situs dan Waktu Penelitian	49
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan sampel	49
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	51
4.5 Metode Pengolahan Data.....	52
4.6 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian.....	53
4.7 Teknik Analisis Data.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN	62
5.1 Deskripsi Data	62
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	66
BAB VI PEMBAHASAN	77
6.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap praktik <i>Creative Accounting</i> ...	77
6.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap praktik <i>Creative Accounting</i>	78
6.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap praktik <i>Creative Accounting</i>	79
6.4 Pengaruh Aktivitas komite audit praktik <i>Creative Accounting</i>	81
6.5 Pengaruh Keahlian komite audit praktik terhadap <i>Creative Accounting</i>	83
6.6 Pengaruh Independensi komite audit terhadap praktik <i>Creative Accounting</i>	84
6.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan institusional Dewan Komisaris, Aktivitas komite audit, Keahlian komite audit dan Independensi komite audit terhadap praktik <i>Creative Accounting</i>	86
BAB VII PENUTUP	88
7.1 Kesimpulan	88

7.2	Implikasi	90
7.3	Keterbatasan	91
7.4	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....		93
LAMPIRAN.....		101

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Data Penelitian	63
Table 5.2 Statistik Deskriptif	65
Table 5.3 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Table 5.4 Hasil Uji Autokorelasi	70
Table 5.5 Hasil Uji Linear Berganda	70
Table 5.6 Hasil Uji Parsial (Uji T)	73
Table 5.7 Hasil Uji Simultan (Uji F)	75
Table 5.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	42
Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas	67
Gambar 5.2 Hasil Uji Heterokedasitas	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Variabel X1	101
Lampiran 2 Variabel X2	103
Lampiran 3 Variabale X3, X4, X5, dan X6	105
Lampiran 4 Manajemen Laba (Y)	108
Lampiran 5 Uji Statistik	112

BAB 1

PENDAHULUAN

1.8. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah suatu media yang menggambarkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan sebagai dasar para pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan yang lebih baik lagi kedepannya. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, seorang akuntan di Indonesia harus mengikuti PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum), yaitu sesuai dengan aturan SAK, SAP, SAK ETAP, dan SAK Syariah (Jaelani, 2014: 1). Tujuan dibentuknya PABU adalah sebagai standar yang menyeragamkan pelaporan keuangan pada suatu entitas bisnis dalam sebuah Negara yang hasilnya berupa laporan keuangan, sehingga memudahkan dalam proses penilaian atas kewajaran pelaporannya atau sering dikenal sebagai *Audit*. Selain itu, PABU juga memberikan keleluasaan bagi para praktik akuntan pada sebuah entitas bisnis untuk memilih metode akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Namun, pada praktisnya, standar akuntansi ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menimbulkan pihak manajemen perusahaan melakukan aktivitas praktik *creative accounting* terhadap laporan keuangannya sehingga menjadikan laporan keuangan menjadi kurang *reliable*.

Aktivitas pendanaan dari investor maupun kreditor untuk kegiatan perusahaan agar eksistensi perusahaan tetap terjaga adalah salah satu cara perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya. Oleh karena itu, para investor dan kreditor mengumpulkan informasi keuangan dan non keuangan yang cukup agar dapat mengambil langkah yang tepat ketika ingin berinvestasi di suatu perusahaan agar dapat meminimalisir ketidakpastian serta risiko yang mungkin akan terjadi.

Setiap perusahaan memiliki harapan untuk memperoleh laba yang tinggi dan stabil karena dalam *Statement of Financial Accounting Concept No. 1* menyebutkan bahwa laba merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja dan pertanggungjawaban manajemen, sehingga baik buruknya kinerja manajemen diukur dari besarnya laba yang dicapai oleh perusahaan. Apabila kinerja keuangan perusahaan dianggap kurang menguntungkan sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi, maka pihak manajemen akan cenderung mengelola laporan keuangannya agar terlihat bagus oleh investor. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu manajemen untuk melakukan praktik *creative accounting*. Disamping itu, pihak manajemen ini dianggap mengabaikan teori etika deontologi yang menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak jujur.

Berkaitan dengan istilah *creative accounting* yang mulai banyak mendapat perhatian praktisi maupun akademisi saat ini, sebenarnya bukan suatu fenomena baru karena Watts & Zimmerman (1986) dalam bukunya mengenai teori akuntansi positif telah membahas dan menjelaskan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu atau ciri-ciri unit usaha tertentu bisa berkaitan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba, yaitu: (1) hipotesis program bonus (*the bonus plan hypothesis*), (2) hipotesis perjanjian utang (*the debt covenant hypothesis*), dan (3) hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*) (Watts & Zimmerman, 1986). Menurut Bhasin (2016), *Creative Accounting* merupakan praktik yang mengikuti (atau mungkin tidak) prinsip atau standar akuntansi, tapi menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya demi menunjukkan citra yang diinginkan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Istilah tersebut dapat disamakan dengan *disclosure management* (manajemen pengungkapan)

dalam kaitannya intervensi dalam proses pelaporan keuangan (Schipper, 1989). Munculnya praktik *creative accounting* disebabkan oleh adanya tekanan pasar terhadap entitas bisnis untuk dapat memenuhi target laba sesuai dengan yang diperkirakan oleh pasar. Tekanan pasar ini terasa dampaknya pada perolehan *income* bagi pihak manajemen, sehingga manajer memutuskan untuk melakukan manajemen laba dalam mempengaruhi angka laba yang mengakibatkan penurunan kualitas laporan keuangan. Tetapi, beberapa penelitian lain menemukan bukti bahwa manajemen laba dapat dibatasi oleh *good corporate governance* (Klein, 2002; Dechow, 1996; Beasley, 1996).

Good corporate governance merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)*. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance*, suatu tata perusahaan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Klasifikasi mekanisme *good corporate governance* menurut Lins & Warnock (2004) dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *internal mechanism* dan *external mechanism*. Cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS) disebut *internal mechanism* seperti dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial, sedangkan cara untuk mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan

mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar disebut *external mechanism* seperti kepemilikan institusional.

Menurut Efendi (2013), kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen akan meningkat seiring dengan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan kemakmuran pada diri mereka sendiri. Inkonsistensi penelitian dibuktikan pada Dimarcia & Krisnadewi (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap praktik *creative accounting*, tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardana & Haryanto (2019), Gunarto & Riswandari (2019) dan Aeni, *et al.* (2019) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan kepada manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer.

Keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Menurut Bernandhi (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Putra, *et al.* (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik *creative accounting* sedangkan Perdana (2019) menunjukkan gap penelitian yang dilakukan oleh Marsyah (2020) telah membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam organisasi yang kompleks ketika kepentingan spesifik dari manajemen eksekutif dan kepentingan yang lebih luas dari perusahaan menyimpang (Davidson, *et al.*, 1985). Pengawasan dewan komisaris Independen terhadap kualitas informasi yang digambarkan dalam laporan keuangan penting untuk dilakukan dewan komisaris diharapkan dapat bertindak secara objektif terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan pihak lain. Peraturan BAPEPAM yaitu No.KEP_315/BEJ/06_2000 dan disempurnakan surat keputusan No.KEP_339/BEJ/07_2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Beasley (1996) juga menyatakan

bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Inkonsistensi penelitian juga telah dibuktikan pada Silfi, *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aprillian, *et. Al* (2021) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Kedua struktur kepemilikan tersebut merupakan mekanisme *good corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*) (Jensen & Meckling, 1976). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka diharapkan manajer akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri selaku pemegang saham, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik *creative accounting*. Begitu pula dengan kepemilikan institusional, semakin besar kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik *creative accounting* (Boediono, 2005). Sedangkan, menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001) bahwa dewan komisaris independen sebagai inti *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Oleh karena itu ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap praktik *creative accounting*.

Praktik *creative accounting* pada suatu perusahaan muncul karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Konflik antara pemegang saham dan manajer ini dijelaskan dalam teori keagenan. Teori keagenan (*agency theory*) (Jensen & Meckling, 1976) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi dalam pelaporan keuangan. Teori ini bermaksud memecahkan dua masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila: (a) keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan; dan (b) bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Bila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham). Permasalahan keagenan terjadi bila prinsipal merasa kesulitan menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak independen yang dianggap mampu sebagai mediator kepentingan antara pihak *principal* dan agen dalam mengelola keuangan yaitu Auditor.

Komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit juga berfungsi untuk menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan eksternal. Adanya komite audit diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak

manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Dalam kaitannya dengan praktik *creative accounting*, perusahaan yang memiliki komite audit mampu meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan manajer melalui fungsi pengawasan terhadap sistem pelaporan keuangan. Beberapa karakteristik komite audit sebagai kontrol yang harus diamati yaitu Aktivitas komite audit, keahlian komite audit dan Independensi komite audit pada suatu entitas bisnis.

Aktivitas komite audit diukur dari frekuensi pertemuan komite audit. Sesuai dengan lampiran peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota. Pertemuan yang diatur terkendali dengan baik dapat mewujudkan terciptanya *good corporate governance* pada sebuah entitas bisnis. Semakin efektif komite audit maka semakin kecil kecenderungan untuk manajer melakukan praktik *creative accounting*.

Blue Ribbon Committee (1999) juga menyatakan bahwa komite audit merupakan '*the ultimate monitor*' dari proses pelaporan keuangan. Pernyataan ini sejalan dengan *The Sarbanes Oxley Act of 2002 (SOX)* yang menekankan pada pentingnya peranan keahlian komite audit terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan (Badolato, *et al.*, 2014), dimana pada *Section 407* dinyatakan bahwa paling tidak satu dari anggota komite audit harus memiliki kemampuan akuntansi. Demikian juga halnya dengan konteks Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2005 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyebutkan bahwa perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota komite audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Dengan demikian, anggota komite audit diharapkan mampu memahami kompleksitas laporan keuangan, mengevaluasi kebijakan

akuntansi, memahami keputusan auditor, dan menilai kualitas pelaporan keuangan (Kalbers & Fogarty, 1993).

Tujuan independensi komite audit adalah tidak ada dalam bagian dari pemegang saham atau jajaran dari manajemen yang dapat menimbulkan *conflict of interest*, tanpa prosedur kontrol yang independen dan efektif, manajemen puncak perusahaan akan selalu tergoda untuk menyimpang dan tidak melindungi stakeholders (Fama & Jensen, 1983). Dengan independensi, komite audit mampu mengoptimalkan dalam *monitoring* dan memberikan kritik terkait kebijakan manajemen sehingga komite audit mampu mengurangi kemungkinan laporan keuangan yang dimanipulasi.

Dalam perusahaan BUMN, kasus pada perusahaan PT. KAI yang sudah melakukan usaha manajemen laba yang bermula dari komisaris yang merangkap sebagai ketua komite audit yang menolak untuk menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, komisaris perusahaan pun meminta pada pihak manajer perusahaan untuk merancang ulang laporan perusahaan tahun 2005 dan memasukan kerugian sesuai dengan fakta. Data dalam laporan keuangan PT. KAI tahun 2005, perusahaan PT. KAI seharusnya meraih kerugian sebesar Rp 63 miliar, akan tetapi perusahaan tetap mencantumkan keuntungan sebesar Rp 6,9 miliar (www.bisnis.tempo.co). Pada kasus lainnya tahun 2015 PT. Garuda Indonesia melakukan tindakan manajemen laba yang bermula dari perintah jajaran direksi yang menginginkan agar merevisi dengan menyeimbangkan pendapatan penjualan dengan biaya pengeluaran perusahaan di bulan Juni, tidak hanya itu jajaran direksi meminta agar biaya-biaya non rutin bulan Juni dimajukan ke bulan Juli atau Agustus 2015, cara ini dilakukan perusahaan agar perusahaan bisa mendapatkan kompensasi pembayaran hutang (www.energyworld.co.id).

Berdasarkan dua kasus diatas, terdapat adanya indikasi praktik *creative accounting* yang dilihat dari kenaikan secara signifikan rata-rata laba perusahaan. Beberapa cara yang digunakan oleh perusahaan yaitu *income maximation* yaitu dengan menaikkan laba bersih perusahaan disaat laba perusahaan menurun.

Mapping untuk identifikasi riset-riset tentang praktik *creative accounting* menggunakan penelitian sebelumnya dari Shatiti (2020), Indra & Setyahadi (2020), Romantis, *et al.* (2020), Meidiani (2020). Dalam keempat jurnal tersebut sudah membahas tentang persepsi mahasiswa tentang *creative accounting*, sejauh mana auditor internal menggunakan berbagai metode pencegahan penipuan, tingkat senioritas dari para manajer yang mempunyai wewenang dan motif untuk menginstruksikan suatu praktik *creative accounting*, serta mengaitkannya dengan salah satu cara dalam penghindaran pajak. Yang belum dibahas dalam keempat jurnal di atas adalah bagaimana peranan para pihak eksternal yang merupakan pihak yang independen dalam mencegah terjadinya praktik *creative accounting*. Maka, penelitian ini berfokus pada para pihak eksternal perusahaan yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional, dewan komisaris independen dan komite audit. Adapun penambahan variabel kepemilikan manajerial karena menurut teori keagenan (*agency theory*) bahwa salah satu cara untuk menghindari *conflict of interest* dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer. Diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan *principal* karena kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer (Pujiati, *et al.*, 2013).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Saleem (2019) ialah dengan adanya penambahan variabel independen yaitu variabel kepemilikan saham dan dewan komisaris independen karena variabel ini dianggap penting untuk

penelitian selanjutnya dan adanya inkonsistensi pada penelitian sebelumnya seperti pada penelitian Yendrawati (2015) membuktikan bahwa kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*, sedangkan penelitian yang sama dilakukan juga oleh Muiz & Ningsih (2018) membuktikan bahwa kepemilikan saham berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*. Pada variabel dewan komisaris independen, penelitian yang dilakukan oleh Aprillian, *et al.* (2021) telah membuktikan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Taco & Ilat (2017) telah membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*. Perbedaan lainnya yaitu dengan penambahan waktu penelitian yaitu 5 tahun. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *creative accounting*. Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kepemilikan Saham, Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Komite Audit terhadap Praktik *Creative Accounting* Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*?

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*?
4. Apakah aktivitas komite audit berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*?
5. Apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*?
6. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*?
7. Apakah kepemilikan saham, dewan komisaris independen dan karakteristik komite audit berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik *creative accounting*
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik *creative accounting*
3. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap praktik *creative accounting*
4. Pengaruh aktivitas komite audit terhadap praktik *creative accounting*
5. Pengaruh keahlian komite audit terhadap praktik *creative accounting*
6. Pengaruh independensi komite audit terhadap praktik *creative accounting*
7. Pengaruh kepemilikan saham, dewan komisaris independen dan karakteristik komite audit terhadap praktik *creative accounting*

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang relevan terhadap bidang akuntansi keuangan di Indonesia, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan praktik *creative accounting* pada perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor mengenai praktik *creative accounting* dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber evaluasi pengungkapan laporan keuangan khususnya pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi emiten dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan praktik *creative accounting* supaya mempertimbangkan berbagai indikator *Good Corporate Governance*

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penyusunan penelitian agar terarah dan mudah dipahami, maka diperlukan adanya ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *creative accounting*. Diantaranya pengaruh kepemilikan saham, dewan komisaris independent dan karakteristik komite audit.

- 2) Objek dari penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.6 Definisi dan Istilah

Beberapa definisi yang dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki manajer.
- 2) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya.
- 3) Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
- 4) Karakteristik komite audit antara lain frekuensi pertemuan komite audit, jumlah anggota komite audit dalam perusahaan tersebut dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota komite audit.
- 5) *Creative accounting* adalah proses memanipulasi angka-angka akuntansi dengan mengambil keuntungan dari celah dalam aturan akuntansi dan pilihan pengukuran dan praktik pengungkapan di dalamnya untuk mengubah laporan keuangan daripada melaporkan transaksi secara netral dan konsisten.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tersusun sebagai berikut:

Bab 1 **Pendahuluan**

Pendahuluan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan serta kegunaan penelitian.

Bab 2 **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan teori dan konsep, serta tinjauan empiris.

Bab 3 **Kerangka Konseptual dan Hipotesis**

Kerangka konseptual dan hipotesis terdiri dari dua subbab, yaitu kerangka konseptual dan hipotesis

Bab 4 **Metode Penelitian**

Metode penelitian terdiri dari: (1) rancangan penelitian, (2) situs dan waktu penelitian, (3) populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, (4) jenis dan sumber data, (5) metode pengumpulan data, (6) variabel penelitian dan definisi operasional, (7) instrument penelitian, dan (8) teknik analisis data

Bab 5 **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian terdiri dari deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian

Bab 6 **Pembahasan**

Bab 7 **Penutup**

Penutup terdiri dari kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Positive Accounting Theory (PAT)*

Perkembangan teori positif sendiri tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif (Watt & Zimmerman, 1986). Dinyatakan pula bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu: (1) Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diujikeabsahannya secara empiris; (2) Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas; (3) Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingatkan bahwa dalam system perekonomian yang berdasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.

Selanjutnya Watt & Zimmerman mengembangkan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empirik dan menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Watts & Zimmerman (1986) lebih khusus lagi mengungkapkan pengaruh variabel-variabel ekonomi terhadap motivasi manajer untuk memilih suatu metode akuntansi. Sehingga dapat dikatakan bahwa

teori akuntansi positif ini lebih memfokuskan pada prediksi tindakan manajer ketika memilih

suatu metode akuntansi yang akan digunakan serta bagaimana manajer merespon standar akuntansi yang baru. Teori akuntansi positif menganggap bahwa manajer secara rasional akan memilih kebijakan akuntansi yang menurutnya baik (Aryani, 2011).

Dalam perspektif ekonomi, Teori akuntansi positif dapat menjelaskan bahwa *creative accounting* dipengaruhi oleh kerangka ekonomi yang bertujuan untuk *self-interest*. Ada berbagai motivasi yang diduga mendasari dan mendorong seorang manajer berperilaku oportunistik. Teori akuntansi positif memiliki tiga hipotesis yang dijadikan dasar motivasi utama manajer melakukan manajemen laba yaitu bonus, kontrak hutang dan biaya politik (Watts & Zimmerman, 1990).

Pada motivasi bonus disebutkan bahwa pihak agen (manajer) akan memperoleh bonus apabila kinerja perusahaan mencapai target tertentu. Sehingga, pihak agen (manajer) akan melakukan praktik *creative accounting* agar mendapatkan kompensasi yang lebih besar.

Dalam Watts & Zimmerman (1990) menyebutkan bahwa manajer akan melakukan praktik *creative accounting* secara agresif untuk mencegah pelanggaran terhadap kontrak hutang. Dan diperkuat oleh Defond & Jiambalvo (1994) yang juga telah membuktikan bahwa manajer melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran batasan hutang.

Terakhir, motivasi terakhir yaitu biaya politik dimana perusahaan yang lebih besar akan melakukan lebih banyak kebijakan yang akan menyebabkan laba menurun dengan maksud mengurangi efek politis. Perusahaan besar cenderung menggunakan prosedur akuntansi dengan menurunkan laba untuk tujuan

mengurangi pembebanan pajak yang tinggi. Meskipun dari segi etika *creative accounting* dianggap tidak etis, bahkan merupakan bentuk dari manipulasi informasi sehingga menyesatkan para pemakainya. Namun, dalam pandangan teori akuntansi positif sepanjang *creative accounting* tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi berterima umum, maka hal ini tidak dipermasalahkan.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi adalah teori yang menjelaskan perilaku suatu perusahaan dari perspektif berbagai kontrak antara berbagai pihak. Pemegang saham yang menyumbangkan dana bagi perusahaan untuk beroperasi tidak dianggap sebagai pemilik perusahaan; mereka adalah pengambil risiko perusahaan.

Salah satu faktor pemicu terjadinya konflik kepentingan menurut Jensen & Meckling (1976) adalah pemisahan fungsi kepemilikan dan pengendalian perusahaan, sehingga hal ini dapat menimbulkan biaya agensi. Ia juga menyatakan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik.

Teori keagenan (*Agency Theory*) sering digunakan untuk menjelaskan praktik *creative accounting*. Timbulnya *earnings management* sebagai dampak dari praktik *creative accounting* terjadi ketika pihak agen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan baik informasi keuangan dan non keuangan kepada pemilik. Informasi yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Namun, pada kenyataannya manajer terkadang tidak menyampaikan informasi akuntansi yang mencerminkan keadaan sebenarnya. Ketidakseimbangan penguasaan informasi

akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*informasi asymmetry*) yaitu suatu kondisi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen (Anggraeni, 2011).

Agency Theory menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*) (Eisenhardt, 1989). Dari ketiga asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dijelaskan bahwa konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* muncul karena masing-masing individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing. Pihak *principal* termotivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, dalam hal ini antara lain motivasi agen untuk memperoleh investasi, pinjaman, kontrak kompensasi dan bonus. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana kedua belah pihak yaitu prinsipal dan agen berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki Setyantomo (2011). Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kinerja yang berbeda.

Perilaku yang tidak semestinya (*disfungsional behavior*) para manajer menjadi penyebab timbulnya asimetri informasi dalam penyajian laporan keuangan. Teori agen menjadi tolak ukur untuk menjawab pertanyaan mengenai resiko praktik *creative accounting* yang akan menimbulkan asimetri informasi dan berdampak pada adanya ketidakseimbangan dalam proporsi informasi yang dikonsumsi kedua belah pihak dikarenakan pihak agen (manajer) berusaha menyembunyikan informasi yang

dimilikinya dengan tujuan agar informasi tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan utilitas perusahaan. Tindakan tersebut boleh jadi akan membuat pihak principal (investor) merasa dirugikan.

Watt & Zimmerman (1986) menyatakan bahwa laporan keuangan seharusnya dibuat dengan angka-angka yang dapat meminimalkan konflik yang bisa saja terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang akan dilaporkan adalah bentuk informasi dasar yang digunakan oleh principal untuk mengukur, mengawasi sekaligus menilai kondisi keuangan perusahaannya agar pemberian kompensasi kepada pihak agen dapat dibuktikan secara autentik. Sehingga, semua pihak akan mempunyai proporsi informasi yang sama dan tidak akan menimbulkan dampak asimetri informasi lagi.

2.2. Creative Accounting

2.2.1 Definisi Creative Accounting

Akuntansi dalam praktek nyata dalam organisasi perusahaan telah membantu manajemen dari suatu organisasi untuk melihat secara jelas fenomena abstrak dan konseptual yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya, misalnya pemaknaan laba dan biaya yang dalam praktek akuntansi dewasa ini merupakan simbol-simbol umum dan secara lazim memang diterima (Widarto, *et al.*, (2009)).

Fajri (2013) menyatakan bahwa Secara harfiah, kata “*creative*” berarti kebolehan seseorang menciptakan ide baru yang efektif, dan kata “*accounting*” itu artinya pembukuan tentang *financial events* yang senantiasa berusaha untuk setia kepada kondisi keuangan yang sebenarnya (*faithful representation of financial events*).

Ada beberapa pendapat tentang akuntansi kreatif atau *creative accounting*, Misalnya, menurut Khatri (2015), *Creative Accounting* secara praktis menggunakan

fleksibilitas yang disediakan dalam prinsip-prinsip akuntansi atau standar akuntansi untuk mengelola pengakuan, pengukuran serta penyajian akuntansi yang berbeda untuk melayani tujuan mereka yang menyiapkan akun (manajemen) daripada mereka yang cenderung menggunakan akun (pihak eksternal, pemegang saham, kreditor). Adapun, Breton, *et al.* (2000); Suwardjono (1990); Naser (1993) dan Amat, *et al.* (2000) adalah sebagai proses pemanipulasian laporan akuntansi dilakukan dengan cara mencari celah-celah peraturan akuntansi demi keuntungan mereka, hal ini mempengaruhi cara pemilihan tolok ukur laporan dan pengungkapan laporan tersebut sehingga terjadi transformasi dari aturan sebenarnya, mereka mempersiapkan pula bagian-bagian laporan yang lebih disukai, dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga dihasilkan laporan akuntansi yang sesuai keinginan, ketimbang membuat laporan berdasarkan cara yang netral dan sesuai prosedur (Widarto, *et al.* (2009)).

Creative accounting sendiri dapat didefinisikan secara beragam, ada yang mendefinisikan secara positif, secara negatif, secara netral (tidak memihak), secara skeptis (cenderung tidak menyetujui), bahkan beberapa referensi menyebutnya sebagai *magic accounting*, *cosmetic accounting*, atau bahkan *financial shenanigan*. Istilah lain dari *creative accounting* adalah manajemen laba (*earning management*), walaupun kedua istilah ini berbeda tapi merupakan aktivitas yang sama.

Sampai detik ini, praktik *creative accounting* masih menjadi kontroversi, terkhusus pada salah satu praktiknya yaitu *earning management*. Beragamnya motivasi maupun tujuan pihak agen dalam menerapkan praktik *creative accounting* masih menjadi perdebatan. Ada yang menganggap bahwa praktik ini masih dapat diterima dan bukanlah bentuk manipulasi tetapi ada juga yang menganggap bahwa praktik ini melanggar kode etis. Maka dari itu, teori akuntansi positif mengakomodasi

penggunaan praktik ini dengan mengacu pada prinsip akuntansi berterima umum sebagai standar yang legal digunakan di Indonesia.

2.2.2 Motivasi *Creative Accounting*

Motivasi atau tujuan dari diterapkannya *creative accounting* biasanya adalah pemicu utama terjadinya penyalahgunaan terhadap praktik *creative accounting* itu sendiri. Passer & Smith (2008) mendefinisikan bahwa motivasi sebagai proses yang akan mempengaruhi arah ketekunan dan kekuatan perilaku individu atau organisasi dalam mencapai tujuan." Artinya, semakin besar motivasi/tujuan seseorang untuk sesuatu dari praktik kreatif yang dilakukannya, maka akan semakin besar pula kemungkinan seseorang tersebut akan menyalahgunakan penerapan praktik *creative accounting*.

Secara umum, ada beberapa hal yang dapat memotivasi seorang individu, badan usaha, maupun organisasi untuk melakukan praktik *creative accounting*, yaitu sebagai berikut :

1. Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Kinerja manajemen adalah salah satu tolak ukur tercapainya laba usaha. Sehingga, pengukuran kinerja karyawan berdasarkan jumlah laba yang dihasilkan ataupun berdasarkan skema bonus yang bisa saja didapatkan tersebut tentunya akan banyak memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya. Namun, tak menutup kemungkinan adanya peluang bagi mereka untuk melakukan praktik *creative accounting* demi untuk menampilkan kinerja (*performance*) yang akan tampak

lebih baik sehingga dapat memaksimalkan jumlah bonus yang mungkin akan mereka dapatkan.

2. Motivasi Utang

Untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer biasanya akan menjalin kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini kreditor. Selanjutnya, untuk dapat meyakinkan kreditor untuk dapat menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan maka manajer harus menunjukkan gambaran kinerja yang baik mengenai perusahaannya kepada kreditor tersebut. Hal inilah yang biasanya akan memotivasi kreditor untuk memanfaatkan praktik *creative accounting* dalam laporan keuangan perusahaannya untuk menampilkan performa baik perusahaannya dengan imbalan perolehan jumlah pinjaman yang besar sesuai harapan mereka.

3. Motivasi Pajak

Tindakan *creative accounting* biasanya juga dimanfaatkan untuk kepentingan pelaporan pajak perusahaan. Perusahaan yang belum *go public* akan memiliki peluang yang lebih besar dan kecenderungan untuk melaporkan dan menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

4. Motivasi Penjualan Saham

Motivasi ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di bursa saham atau perusahaan yang *go public*. Sebuah perusahaan atau emiten yang mampu memberikan gambaran dan pelaporan kinerja yang baik biasanya akan lebih banyak mendapatkan respon positif dari para pemegang saham di pasar saham pada saat proses penjualan saham tersebut berlangsung. Kondisi seperti inilah yang biasanya memotivasi manajer untuk

menerapkan penyalahgunaan praktik *creative accounting* dengan tujuan menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari biasanya sehingga dapat menarik minat pemegang saham dan memenangkan pasar.

5. Motivasi Pergantian Direksi

Motivasi ini biasanya akan terjadi pada perusahaan besar yang dimana bidang usahanya lebih banyak berinteraksi langsung dan menyentuh kepentingan masyarakat luas seperti perusahaan-perusahaan industri seperti minyak, gas, listrik dan lain sebagainya. Demi untuk tetap bisa mendapatkan subsidi, perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk bisa menjaga posisi keuangannya dalam kondisi tertentu seperti prestasi dan kinerja perusahaan yang tampak tidak terlalu baik. Hal ini membuat perusahaan memiliki potensi lebih dalam menerapkan praktik *creative accounting* untuk membuat laba menjadi lebih rendah dari nilai biasanya.

2.2.3. Pola *Creative Accounting*

Selain itu, Scott (1997) telah merangkum pola umum *creative accounting* yang banyak diterapkan di perusahaan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pola *Taking A Bath*

Pola *taking a bath* dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan yang sedang mengalami permasalahan organisasi (*organizational stress*) atau bisa jadi perusahaan tersebut sedang dalam prose pergantian pimpinan manajemen perusahaan.

2. Pola *income minimization*

Pola *income minimization* dilakukan dengan cara menjadikan laba periode tahun berjalan agar lebih rendah daripada laba yang sebenarnya. Secara praktis, pola ini relatif sering dilakukan karena motivasi perpajakan dan politis. Untuk menjaga konsistensi bantuan, subsidi, maupun resiko diprivatisasi, maka manajer akan berpotensi untuk melakukan kecenderungan menurunkan jumlah laba karena khawatir jika kinerja baik, sahamnya akan dijual atau tidak mendapatkan bantuan.

3. Pola *Income Maximization*

Pola *income maximization* ini merupakan kebalikan dari pola *income minimization* yang telah dijelaskan sebelumnya. Pola ini menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba yang sebenarnya. Pola ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO (*Initial Public Offerings*) agar mendapatkan kepercayaan dari kreditor.

4. Pola *Income Smoothing*

Pola ini dilakukan dengan cara mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang dilaporkan akan relative lebih stabil. Untuk investor dan kreditor yang memiliki sifat *risk adverse*, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan.

2.2.4 Metode *Creative Accounting*

Creative Accounting lebih dari sekedar perubahan laba. Berbagai metode *Creative Accounting* menurut Amat, *et al.* (2000) meliputi :

1. Mengubah metode akuntansi.

Metode akuntansi digunakan dalam penilaian aset perusahaan. Berikut adalah beberapa metode akuntansi, antara lain:

a) Metode penilaian persediaan menggunakan *First In First Out (FIFO)*, *Last In First Out (LIFO)*, dan *Average Cost*.

- *First In First Out (FIFO)*. Metode FIFO menghitung nilai persediaan dengan nilai perolehan barang yang masuk ke gudang pertama kali sebagai barang persediaan awal yang dijual ke pelanggan sehingga barang yang tersisa di persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir dibeli atau masuk ke gudang. Metode FIFO banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena dianggap memberikan dampak terhadap nilai aset yang dibeli perusahaan dan menghasilkan nilai tinggi untuk persediaan.
- *Last In First Out (LIFO)*. Metode LIFO merupakan kebalikan dari metode FIFO. Metode LIFO sudah tidak boleh dipergunakan menurut *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. Dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 tahun 2008, metode LIFO tidak diperbolehkan lagi penggunaannya, hanya metode FIFO dan *Average* yang diperbolehkan dalam menghitung persediaan, hal ini diperjelas dalam pasal 10 ayat 6. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan metode LIFO laba yang dihasilkan oleh perusahaan rendah sehingga menyebabkan pembayaran pajak ke negara lebih sedikit (diasumsikan bahwa harga pembelian persediaan terus mengalami peningkatan dikarenakan inflasi).
- *Average Cost Metode*

Average Cost digunakan untuk menghitung biaya dari persediaan akhir dan juga menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) pada setiap periode berdasarkan biaya rata-rata per unit persediaan. Untuk menghitung *Average cost*, rumus yang biasa digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Biaya rata rata per unit} = \frac{\text{total nilai persediaan}}{\text{total unit persediaan}}$$

b) Metode penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode *straight line*, *activity method*, dan *declining*.

- Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Metode *straight line* digunakan untuk menghitung depresiasi aset yang besarnya sama untuk setiap tahun masa manfaat aset. Hal ini disebabkan karena dasar perhitungannya menggunakan waktu. Untuk menentukan biaya depresiasi setiap tahunnya dengan metode *straight line* adalah dengan membagi biaya yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset. Untuk menghitung depresiasi menggunakan metode *straight line*, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Harga Perolehan – Nilai Sisa = Biaya yang Dapat Disusutkan

$$\text{Beban Depresiasi Tahunan} = \frac{\text{biaya yang dapat disusutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

Banyak perusahaan yang menggunakan metode *straight line* dalam menghitung depresiasi aset perusahaannya. Hal ini disebabkan karena metode *straight line* mudah digunakan.

- Metode Unit Aktivitas (*Activity Method*). Metode unit aktivitas menggunakan total unit produksi atau tingkat penggunaan aset

dalam menghitung nilai depresiasi. Metode ini sangat cocok digunakan dalam menghitung nilai depresiasi untuk mesin pabrik, peralatan pengangkutan, dan pesawat terbang. Untuk mesin pabrik, metode ini dapat menggunakan jumlah unit yang dihasilkan atau dengan menggunakan jam kerja mesin, peralatan pengangkutan dapat menggunakan jarak tempuh, dan pesawat terbang dapat menggunakan jam terbang pesawat tersebut. Untuk menghitung depresiasi menggunakan metode unit aktivitas, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Biaya depresiasi per unit} = \frac{\text{biaya yang dapat disusutkan}}{\text{total unit aktivitas}}$$

$$\text{Beban Depresiasi Tahunan} = \text{Biaya yang Dapat disusutkan per unit} \times \text{aktivitas unit selama tahun berjalan}$$

Penggunaan metode ini tidak sebanyak penggunaan metode straight line karena sulit untuk membuat dasar yang mudah diterima tentang estimasi total aktivitas.

- Metode Saldo Menurun

Metode saldo menurun (*Declining balance method*). Metode saldo menurun menghasilkan beban depresiasi yang setiap tahunnya menurun selama masa manfaat aset. Tidak seperti metode depresiasi yang lain, metode saldo menurun tidak menggunakan biaya yang dapat disusutkan. Hal ini karena nilai sisa diabaikan untuk menentukan jumlah yang dapat disusutkan. Tetapi nilai sisa tetap digunakan untuk menetapkan batas total depresiasi.

Depresiasi akan dihentikan apabila nilai buku aset sudah sama dengan nilai sisa yang diperkirakan. Untuk menghitung depresiasi menggunakan metode saldo menurun, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Buku pada Awal Tahun} \times \text{Tarif Saldo Menurun} = \text{Beban Depresiasi Tahunan}$$

2. Membuat estimasi akuntansi.

Membuat estimasi akuntansi dilakukan untuk mempengaruhi laba akuntansi melalui kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Beberapa bentuk estimasi akuntansi tersebut antara lain:

- a) Estimasi dalam menentukan jumlah piutang tidak tertagih. Ketika membuat estimasi tingkat piutang tidak tertagih, manajer cenderung membuat berdasarkan persentase piutang dibanding persentase penjualan. Hal ini dikarenakan persentase piutang tidak tertagih yang dibuat berdasarkan tingkat penjualan akan lebih memenuhi kebijakan *matching principle*, yaitu prinsip akuntansi di mana pengakuan atas pendapatan dan beban diakui pada periode yang sama.
- b) Estimasi dalam menentukan umur ekonomis aset. Estimasi ini dilakukan apabila perusahaan mengharapkan kenaikan laba sehingga hasil yang akan diperoleh yaitu laba menjadi lebih tinggi karena biaya penyusutan menurun.
- c) Estimasi tingkat bunga pasar yang digunakan untuk mendiskonto arus kas dimasa yang akan datang untuk menilai kewajaran aset yang tidak memiliki pembanding atau kewajaran nilai obligasi.

3. Mereklasifikasi akun.

Permainan akuntansi ini dilakukan dengan cara memindahkan posisi akun dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sebenarnya laporan keuangan ini sudah disajikan dengan benar, namun karena kelihaihan penyajian, hal ini dapat memberikan dampak interpretasi yang berbeda bagi penggunanya. Misalnya dengan memperbesar nilai pendapatan perusahaan sehingga investor tertarik berinvestasi pada perusahaannya. Teknik reklasifikasi lainnya yaitu dalam hal utang jangka panjang yang dimasukkan ke aset jangka pendek. Tujuannya untuk meningkatkan rasio likuiditas perusahaan agar terlihat lebih likuid.

4. Mengubah periode pengakuan pendapatan dan biaya.

Teknik ini dilakukan untuk mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau biaya dengan menggeser biaya atau pendapatan ke periode berikutnya agar memperoleh laba maksimum.

2.3 Good Corporate Governance

Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah karyawan, dan *stakeholder* internal maupun eksternal lain, mengenai hak dan kewajiban mereka, atau sistem dimana perusahaan diatur (*directed*) dan dikendalikan (*controlled*), dan tujuan dari *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*.

2.3.1 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Organization For Economic and Development (OECD) menekankan prinsip-prinsip *good corporate governance* agar perusahaan mampu berjalan secara

berkelanjutan serta mampu bermanfaat bagi *stakeholders*. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu:

1. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. Transparansi (*transparency*)

Transparansi merupakan upaya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Dalam hal obyektifitas bisnis, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang relevan dan material yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan perusahaan.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

4. Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibilitas merupakan tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta penanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

5. Independen (*independency*)

Untuk melancarkan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

6. Keterbukaan (*Disclosure*) Manajer harus terbuka dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. *Disclosure* erat kaitannya dengan transparansi bahwa perusahaan diharuskan mampu memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan. Perusahaan sukses rata-rata adalah mereka yang mampu menjabarkan prinsip-prinsip organisasional-manajerialnya ke dalam kaidah operasional *good corporate governance (GCG)* sebagai prinsip dasar bangunan profesionalismenya. Ketaatan pada kaidah-kaidah tersebut, merupakan cerminan bahwa manajemen suatu perusahaan beserta segenap jajaran pelaku organisasinya telah mampu mendesain dan menerapkan sistem *governance* yang profesional dan proporsional. Dengan demikian, tidaklah heran jika perusahaan yang secara konsisten membangun dan menerapkan prinsip-prinsip GCG akhirnya akan mampu menghadirkan sistem dan lingkungan yang kondusif bagi setiap jajaran pelaku organisasi untuk berprestasi.

2.3.2. Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perusahaan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam GCG (*Good Corporate Governance*) yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

- 1) Pemegang saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan komisaris;
- 4) Manajer;
- 5) Karyawan;
- 6) Sistem remunerasi berdasar kinerja;
- 7) Komite audit.

2.3.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase jumlah kepemilikan institusional terhadap jumlah saham secara keseluruhan. Sedangkan, institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen perusahaan karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional oleh beberapa peneliti dipercaya dapat mempengaruhi

jalannya perusahaan. *Earnings Management* oleh manajemen dapat diminimumkan melalui mekanisme *monitoring* untuk menyelaraskan (*alignment*) perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen antara lain dengan kepemilikan saham oleh institusional karena mereka dianggap sebagai *sophisticated* investor dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Karena institusi memantau secara profesional mengenai perkembangan pada investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi, hal itu dapat menekan adanya potensi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen

. 2.3.4. Kepemilikan Manajerial

Jensen & Warner (1988), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen perusahaan, karena manajemen dapat merasakan secara langsung manfaat yang akan diperoleh dan akan menanggung risiko atas keputusan yang diambil. Dengan demikian hal ini diharapkan dapat memotivasi pihak manajemen untuk meningkatkan kinerjanya. Kepemilikan manajerial dapat diartikan pula sebagai keikutsertaan pihak manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan, diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Pihak manajemen adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer, dan karyawan (Boediono, 2005).

2.3.5. Dewan komisaris

Dewan komisaris memiliki peran penting dalam memonitor fungsi kerja dari dewan direksi. Menurut *Forum for Corporate Governance (FCGI)* (2001) bahwa dewan komisaris sebagai inti *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang

ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang dipilih langsung oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Tugas dewan komisaris yaitu untuk mengawasi manajer dalam melakukan tugasnya melaporkan laporan keuangan untuk menjalankan dan menerapkan standar sistem *good corporate governance* dengan baik dan benar dan harus bersikap independen. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) membedakan dewan komisaris menjadi dua yaitu dewan komisaris independen dan non independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Keberadaan komisaris independen memiliki peran penting dalam hal pengawasan terhadap jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa manajer telah menjalankan praktik transparansi, akuntabilitas, kemandirian pengungkapan, dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan.

2.4 Karakteristik Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. BAPEPAM melalui surat edaran No.SE03/PM/2000 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Komite audit menjalankan peran penting dalam mengawasi operasi dan sistem pengendalian internal perusahaan dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang saham. Komite audit memberikan kontribusi pada

pengembangan rencana strategis perusahaan dan diharapkan untuk menyediakan input dan rekomendasi kepada dewan direksi dengan memperhatikan pada setiap persoalan keuangan atau operasional. Oleh karena itu, diakui bahwa sebuah komite audit yang efektif akan berfokus pada peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan, khususnya pada lingkungan bisnis yang sedang berubah yang berada di luar kendali perusahaan (Charan, 1998; Craven & Wallace, 2001). Terdapat beberapa karakteristik komite audit, diantaranya yaitu :

2.4.1 Aktivitas Komite Audit

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa sesuai dengan lampiran peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota. Semakin banyaknya frekuensi pertemuan komite audit dengan manajemen, maka diharapkan juga semakin berkurang potensi praktik *creative accounting* dalam perusahaan.

2.4.2 Keahlian Komite Audit

Blue Ribbon Committee (1999) telah merekomendasikan bahwa NYSE dan NASD mensyaratkan komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan. Rekomendasi ini muncul karena pada dasarnya, komite audit dibentuk untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan untuk membatasi pelaporan manajer yang oportunistik (Badolato, 2014). *Blue Ribbon Committee* (1999) juga menyatakan bahwa komite audit merupakan '*the ultimate monitor*' dari proses pelaporan keuangan. Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2005 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyebutkan bahwa perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota komite audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi

dan keuangan. Keahlian di bidang keuangan dianggap penting bagi efektivitas komite audit karena dalam penugasannya komite audit sangat membutuhkan keahlian di bidang akuntansi/keuangan yang sangat baik (Zaman, *et al.*, 2011) dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham (DeFond, *et al.*, 2005). Secara lebih rinci, Trautman (2012) mengemukakan bahwa '*audit committee financial expert*' didefinisikan sebagai individu yang memiliki: (1) pemahaman tentang standar akuntansi yang berlaku umum; (2) kemampuan untuk menilai penerapan berbagai prinsip yang berkaitan dengan estimasi akuntansi, akrual, dan pencadangan; (3) pengalaman dalam mempersiapkan, memeriksa, menganalisis, atau mengevaluasi laporan keuangan; (4) pemahaman terkait pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan; dan (5) pemahaman tentang fungsi komite audit. Sementara itu, keahlian keuangan berhubungan dengan keahlian spesifik dalam mengelola keuangan.

2.4.3 Independensi Komite Audit

Komite audit sebagai pihak ekstern perusahaan yang independen, tentu tidak terlibat dalam tugas sehari-hari yang internal manajemen lakukan yang mengelola perusahaan, juga memiliki pengalaman sebagai pengawas yang efektif. Komite audit berfungsi untuk mengawasi proses pelaporan keuangan untuk mengurangi gangguan dalam informasi laba sehingga pasar diduga akan bereaksi lebih kuat. Adanya independensi pada komite audit dapat menambah kepercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan dan mengurangi risiko adanya praktik *creative accounting*.

2.5 Tinjauan Empiris

Penelitian mengenai karakteristik komite audit terhadap praktik *creative accounting* sudah pernah diteliti oleh peneliti yang lain, namun penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali karakteristik komite audit terhadap praktik *creative accounting* dengan menambahkan variabel *good corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Shatiti & Achmad (2020) mengkaji hubungan antara *good corporate governance* dengan praktik *creative accounting*. Dalam penelitiannya, pemilihan sampel dilakukan terhadap 83 dari 170 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Variabel *good corporate governance* pada penelitian ini terdiri dari komisararis independen dan komite audit eksternal. Hasil menunjukkan bahwa variabel komite audit eksternal berpengaruh signifikan terhadap praktik *creative accounting*, sedangkan variabel komisararis independen tidak berpengaruh terhadap praktik *creative accounting*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Firmansyah, *et al.* (2016) mengkaji hubungan antara komisararis independen dan komite audit dan manajemen laba. Dengan menggunakan *purposive sampling method*, dilakukan penelitian pada 14 perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun (2010-2013). Hasil menunjukkan bahwa secara parsial komisararis independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian *Creative Accounting* juga telah dilakukan oleh Indra, *et al.* (2020) yang mengaitkannya dengan etika auditor dan pengalaman auditor yang dianggap mampu mengidentifikasi praktik *creative accounting* yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil menunjukkan bahwa etika auditor dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap praktik *creative accounting* berdasarkan penelitian yang

dilakukan pada tahun 2020 di 16 KAP yang terdiri dari 7 KAP di Kabupaten Tangerang dan 9 KAP di Kota Tangerang Selatan. Adapun penelitian yang menghubungkan antara perencanaan pajak dan praktik *creative accounting*. Menurut teori agensi, perencanaan pajak (*tax planning*) ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Romantis, *et al.* (2020). Hasil menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik *creative accounting* dengan menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar pada LQ45 Tahun 2017-2018.

Penelitian Purnama (2017). yang mengkaji hubungan antara Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 47 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2015 dengan menggunakan *purposive sampling method*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Putra, *et al.* (2020) yang mengkaji hubungan antara dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan leverage terhadap manajemen laba. Dengan menggunakan data sekunder, sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 13 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian Nur Zaimah (2020) yang mengkaji hubungan antara Independensi komite audit, ukuran komite audit, kompetensi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap manajemen laba. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sampel ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 21 perusahaan manufaktur sehingga total observasi dalam penelitian ini sebanyak 105 observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi komite audit dan frekuensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan independensi komite audit dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian lain dilakukan oleh Harefa (2020) yang mengkaji hubungan antara karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Karakteristik komite audit pada penelitian ini diantaranya yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2018, yakni sebanyak 59 perusahaan. Dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, maka jumlah sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 30 perusahaan. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba. Dalam hal ini, karakteristik komite audit yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia, dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Meidiani (2020), menguji keterkaitan antara kompensasi manajemen, obligasi kontraktual dan manajemen pajak dengan

praktik *creative accounting*. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 104 perusahaan, dan jumlah sampel adalah 42 perusahaan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda, hasil menunjukkan bahwa kompensasi manajemen, obligasi kontraktual dan manajemen pajak berpengaruh signifikan terhadap praktik *creative accounting*.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

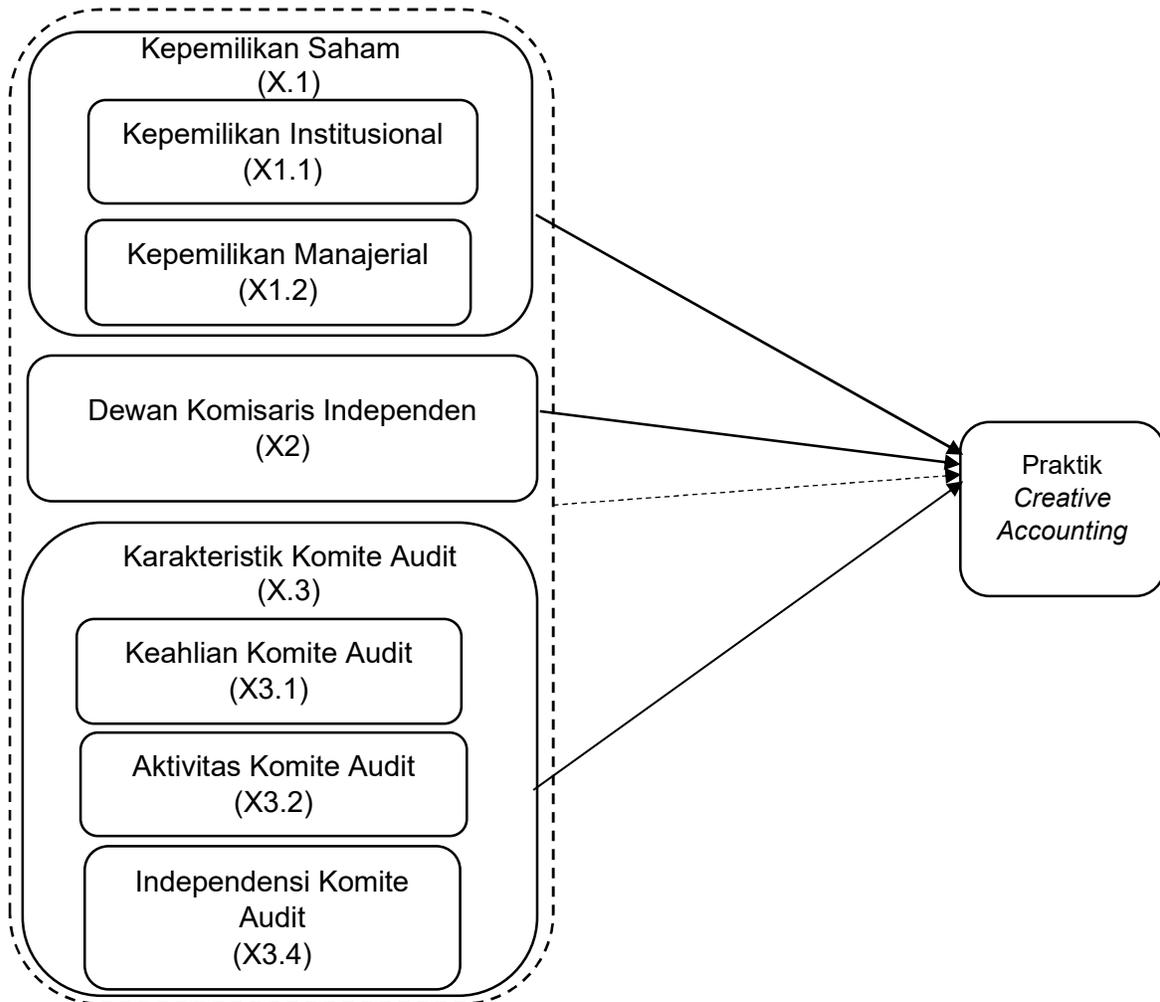
3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Dalam pembentukan kerangka berpikir, peneliti menggunakan model Analisis Regresi Berganda. Analisis ini merupakan analisis linear yang digunakan dengan jumlah variabel independen lebih dari 2 (dua) variabel.

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu praktik *creative accounting* yang diproksikan dengan *discretionary accruals*. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini yaitu *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen, dan karakteristik komite audit yang diproksikan dengan aktivitas komite audit, keahlian komite audit dan independensi komite audit. Keterkaitan pada variabel-variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



3.2 Pengembangan Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Kepemilikan Saham terhadap Praktik Creative Accounting

3.2.1.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Praktik *Creative Accounting*

Menurut Mahariana, *et al.* (2014) kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya). Keberadaan investor

institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Investor institusional memiliki kemampuan yang unggul dalam memonitoring praktik *creative accounting* dibandingkan investor individual (Kholis, 2014). Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost* (Saffudin & Prasetyono (2011)).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putra, *et al.* (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik *creative accounting* sedangkan Perdana (2019) dan Marsyah (2020) telah membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*. Berdasarkan penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₁ = Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*

3.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Praktik *Creative Accounting*

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial yang besar di dalam perusahaan akan efektif untuk mengawasi aktivitas perusahaan Pujiati & Widanar (2009). Semakin tinggi

kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka semakin rendah praktik *creative accounting*, artinya dengan adanya peningkatan kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan akan mampu untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer dalam bertindak agar lebih berhati-hati, karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya.

Menurut Wardani (2011) mengatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong manajer untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak secara hati-hati, karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya. Praktik *creative accounting* dapat dilakukan oleh manajer dengan cara memilih prosedur akuntansi tertentu yang dianggap paling menguntungkan bagi manajer.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimarcia & Krisnadewi (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap praktik *creative accounting*, tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardana & Haryanto (2019), Gunarto & Riswandari (2019) dan Aeni, *et al.* (2019) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh *negative* terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian di atas, maka di ajukan hipotesis pertama dalah sebagai berikut:

H₂ = Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*

3.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Praktik *Creative Accounting*

Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi (pihak yang mempunyai hubungan bisnis atau hubungan kekeluargaan) dengan pihak perusahaan. Dewan direksi dan dewan komisaris

dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. Peran direksi dan komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi *corporate governance* (Effendi, 2016).

Berdasarkan teori agensi, adanya pengawas oleh dewan komisaris akan menambah keyakinan bahwa manajemen telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena dewan komisaris diangkat oleh pemegang saham maka mereka harus mewakili kepentingan para pemegang saham dalam mengawasi tindakan manajemen. Penelitian yang telah dilakukan oleh Silfi, *et al.* (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aprillian, *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H₃ = Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*

3.2.4 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Praktik *Creative Accounting*

Adanya penerapan *good corporate governance* yang baik akan semakin lengkap dan efektif dengan adanya keaktifan komite audit dalam mengadakan pertemuan. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan oleh pihak manajemen, akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar dapat meminimalisir adanya praktik *creative accounting*. Dalam POJK NO.55/POJK.04/2015 menyebutkan bahwa “Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”. Atau dengan kata lain, Frekuensi pertemuan komite audit adalah paling sedikit 4 kali dalam satu tahun.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumaningtyas & Farida (2016) dan Nainggolan (2021) menunjukkan bahwa aktivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba tetapi penelitian yang dilakukan oleh Widiastuty (2016) menunjukkan bahwa aktivitas komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi tingkat aktivitas pertemuan komite audit dapat meminimalisasi praktik *creative accounting*. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

H₄ = Aktivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*

3.2.5 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Praktik *Creative Accounting*

Sesuai dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang berwenang yaitu peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit untuk mengatur komite audit dalam menjalankan tugas sebagai pengawas intern perusahaan. Aturan tersebut membahas mengenai beberapa karakteristik komite audit diantaranya salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan (OJK, 2015). Selanjutnya, Dwiharyadi (2017) mengungkapkan bahwa keahlian akuntansi berfokus pada proses penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, sedangkan keahlian keuangan lebih berfokus pada pengelolaan keuangan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka mengurangi praktik *creative accounting*, membutuhkan keahlian akuntansi karena penyusunan pelaporan keuangan sangat berkaitan dengan keahlian dalam memahami siklus akuntansi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Widasari & Isgiyarta (2017) dan Dwiyanti & Astriena (2019) menunjukkan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah & Mu'id (2018) juga menunjukkan bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya, semakin banyak komite audit yang berlatar belakang pendidikan akuntansi/keuangan, maka akan meminimalisir praktik *creative accounting*. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis kelima adalah sebagai berikut:

H₅ = Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*

3.2.6 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Praktik *Creative Accounting*

Menurut teori keagenan, anggota independen adalah pengawas yang mampu menurunkan asimetri informasi dan menjadi perantara kepentingan pemilik dan pihak manajemen. Mengupayakan terpeliharanya integritas dan pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit menjadi salah satu alasan utama independensi sangat diperlukan, karena individu yang independen akan cenderung lebih adil dan tidak memihak secara obyektif dalam menangani suatu masalah (*Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002*).

Keberadaan komite audit yang independen mampu mengoptimalkan reputasi komite audit sebagai pengawas yang baik, mampu memberikan opini yang lebih objektif dan lebih mampu memberikan rekomendasi dalam hubungannya dengan kebijakan yang ditetapkan dan dilakukan manajemen (Rahmat & Iskandar, 2009). Independensi yang senantiasa dipertahankan pada komite audit akan meningkatkan

kepercayaan investor atas laporan keuangan dan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan yang disebabkan karena kasus penyimpangan tata kelola perusahaan Revitasari, *et al.* (2017).

Hasil penelitian Andreas, *et al.* (2016) dan Susanti, E. (2017) menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aini (2018) menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis kelima adalah sebagai berikut :

H₆ : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*

3.2.7 Pengaruh Kepemilikan Saham, Dewan Komisaris Independen, dan Karakteristik Komite Audit terhadap Praktik Creative Accounting

Teori Keagenan menurut Jensen dan Meckling sering digunakan untuk menjelaskan *creative accounting*. Perilaku manusia dalam bentuk keinginan, motivasi, dan utilitas akan berbeda. Misalnya, perilaku *agent* dan *principal* yang menimbulkan kemungkinan *agent* bertindak merugikan *principal*, antara lain berperilaku oportunistik dan *creative accounting*. Masalah keinginan dari *principal* dan *agent* yang bertentangan serta *principal* kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh *agent*, memberi tindakan bagi *principal* untuk memecahkan masalah tersebut melalui pemberian kesesuaian kompensasi kepada *agent*, mengeluarkan biaya *monitoring*, pengendalian internal yang efektif.

Mapping untuk identifikasi riset-riset tentang praktik *creative accounting* menggunakan penelitian sebelumnya dari Shatiti (2020), Indra & Setyahadi (2020),

Romantis, *et al.* (2020), Meidiani (2020). Dalam keempat jurnal tersebut sudah membahas tentang persepsi mahasiswa tentang *creative accounting*, sejauh mana auditor internal menggunakan berbagai metode pencegahan penipuan, tingkat senioritas dari para manajer yang mempunyai wewenang dan motif untuk menginstruksikan suatu praktik *creative accounting*, serta mengaitkannya dengan salah satu cara dalam penghindaran pajak. Yang belum dibahas dalam keempat jurnal di atas adalah bagaimana peranan para pihak eksternal yang merupakan pihak yang independen dalam mencegah terjadinya praktik *creative accounting*.

Penelitian Febriana (2013), menunjukkan bahwa praktik *creative accounting* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hasil studi berbeda menunjukkan akuntan peringkat tinggi cenderung untuk melakukan nilai-nilai komersial karena adanya proyek profesi serta manajemen merekayasa penghasilan sebelumnya dengan menghubungkan pada manajemen laba sebelumnya untuk pengembangan rekayasa pendapatan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis kelima adalah sebagai berikut :

H₇ : Kepemilikan saham, dewan komisaris independent dan karakteristik komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik *creative accounting*